

PEMBANGUNAN DESA DAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN DI INDONESIA

Arya Yahya¹, Riska Eka Agustina²

^{1,2}Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan

¹arya.yahya@bps.go.id; ²riskaeka@bps.go.id

Diterima: April 2022; Disetujui: Juni 2022

Abstract. Poverty alleviation in Indonesia faces the main challenges with high poverty rates in rural areas. The concentration of the economy in urban areas has resulted in a much larger rural poverty than in urban areas. Because poverty in Indonesia is identical to rural areas, efforts to reduce poverty levels in rural areas through village development are a top priority in reducing the national poverty level. This study aims to analyze the effect of rural development on district poverty levels in Indonesia. The dependent variable used in this study is the district poverty level. In contrast, the primary independent variable is the number of developing and autonomous villages in each district, which is the approach of the village development variable. This study used data from 2014 and 2018. The result of multiple linear regression analysis found that the village development variable significantly reduces district poverty levels. This study also found that the strength of the correlation between village development variables and district poverty levels in the eastern part of Indonesia is higher than in the western part of Indonesia. Developing in rural areas is necessary to reduce the number of disadvantaged villages into developing and autonomous villages.

Keywords: multiple linear regression, poverty rate, village development.

Abstraksi. Pengentasan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan utama dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Terpusatnya perekonomian di daerah perkotaan telah menimbulkan jumlah kemiskinan pedesaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Mengingat kenyataan bahwa kemiskinan di Indonesia identik dengan wilayah pedesaan, maka upaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pembangunan desa merupakan prioritas utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan desa terhadap tingkat kemiskinan kabupaten di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan kabupaten, sedangkan variabel independen utamanya adalah jumlah desa berkembang dan mandiri setiap kabupaten, yang merupakan pendekatan dari variabel pembangunan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2014 dan 2018. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pembangunan desa secara statistik signifikan menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan korelasi antara variabel pembangunan desa dan tingkat kemiskinan kabupaten di bagian timur Indonesia lebih besar dibandingkan di bagian barat Indonesia. Pembangunan di wilayah pedesaan perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal menuju desa berkembang dan mandiri.

Kata kunci: pembangunan desa, regresi linear berganda, tingkat kemiskinan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terus dihadapkan pada masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2020,

sebanyak 26,42 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan utama

dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

Wilayah pedesaan selama ini telah menjadi penyumbang jumlah kemiskinan terbesar dari total penduduk miskin di Indonesia. Terakhir, pada Maret 2020, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia mencapai 12,82 persen, jauh melebihi tingkat kemiskinan perkotaan di angka 7,38 persen. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kemiskinan pedesaan rata-rata hanya berkurang 0,29 persen setiap tahun.

Terpusatnya perekonomian di daerah perkotaan selama beberapa dekade memang telah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan, kondisi yang telah berlangsung lama telah membawa kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Salah satu dampaknya adalah jumlah kemiskinan pedesaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Realitas tersebut sejalan dengan temuan Akita dan Lukman (1999) yang mengungkapkan bahwa kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu penyumbang tertinggi kesenjangan secara nasional.

Mengingat kenyataan bahwa kemiskinan di Indonesia identik dengan wilayah perdesaan, maka upaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dipandang sebagai prioritas utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus berupaya melakukan pembangunan di wilayah desa untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia, dengan harapan kesejahteraan di wilayah pedesaan membaik dan angka kemiskinan pedesaan mengalami penurunan.

Hasil pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini mulai terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD). IPD merupakan indeks komposit yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Seluruh indikator IPD tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, hingga penyelenggaraan pemerintah desa mengalami kenaikan.

Kenaikan IPD dalam seluruh komponen indikatornya menunjukkan pembangunan desa yang semakin membaik, namun demikian, problem utama terkait dengan tingkat kemiskinan pedesaan yang tinggi masih menjadi masalah yang terus dihadapi. Bahkan, secara regional, tingkat kemiskinan pedesaan di beberapa provinsi di Indonesia justru mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Beberapa penelitian terdahulu menganalisis pengaruh beberapa aspek pembangunan desa terhadap kemiskinan secara parsial. Diantaranya, Medeiros, Ribeiro, dan Amaral (2021) yang meneliti pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan rumah tangga di Brasil; Ahmed dan Eklund (2019) meneliti ketersediaan aksesibilitas terhadap mata pencaharian lokal di beberapa desa di Bangladesh; Charlery, Qaim, dan Smith-Hall (2016) menganalisis efek pembangunan jalan pedesaan terhadap pendapatan rumah tangga dan ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan Nepal; Fan dan Zhang (2008) meneliti pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan pertanian dan kemiskinan pedesaan di Uganda; serta Dercon, dkk. (2007) yang meneliti peningkatan akses jalan terhadap pertumbuhan konsumsi dan pengurangan kemiskinan di Ethiopia;

Beberapa penelitian terdahulu juga berusaha mengamati proses berlangsungnya pembangunan desa secara parsial terutama setelah lahirnya undang-undang desa. Studi yang dilakukan oleh Damayanti dan Syarifuddin (2020) mengungkapkan adanya persoalan inklusivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia. Literasi keuangan dan kapasitas pejabat pemerintah desa juga menjadi masalah yang paling banyak ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan desa (Yoseph, Sarman, dan Hidayat 2019; Harun dkk. 2020).

Meskipun pelaksanaan program pembangunan desa mendapatkan banyak hambatan, namun berbagai studi mengungkapkan bahwa pembangunan desa dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan (Fan, Hazell, dan Thorat 2000; Dercon dkk. 2007; Fan dan Zhang 2008; Khandker, Bakht, dan Koolwal 2009; Runsinarith 2009; Khandker dan Koolwal 2010; Mu dan Walle 2011; Uddin, Chowdhury, dan Ahmad 2015; Charlery, Qaim, dan Smith-Hall 2016; Ahmed dan Eklund 2019; Medeiros, Ribeiro, dan Amaral 2021).

Temuan dari beberapa penelitian di atas sejalan dengan empat pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi neo klasik, salah satunya menitikberatkan pertumbuhan output pada akumulasi modal atau investasi, salah satu bentuk modal adalah investasi pemerintah dalam bentuk modal masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Kedua adalah *growth pole theory*. Ketiga adalah pertumbuhan ekonomi endogen dan teori *human capital*. Keempat adalah pendapatan untuk faktor produksi tenaga kerja. Investasi baik dari APBN, APBD, maupun dana desa akan menjadi

sumber pendapatan bagi masyarakat yang menjadi tenaga kerja di desa masing-masing.

Keterbatasan dari beberapa penelitian sebelumnya terletak pada ukuran pembangunan desa, sebagian besar penelitian-penelitian menganalisis pengaruh beberapa aspek pembangunan desa terhadap kemiskinan secara parsial, bukan pada satu ukuran tunggal yang mewakili sebuah ukuran pembangunan desa.

Beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian lain yaitu (1) penggunaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagai ukuran tunggal yang menggambarkan perkembangan desa, (2) periode penelitian yaitu tahun 2014 dan 2018, (3) cakupan sampel melibatkan seluruh kabupaten yang minimal 70 persen penduduknya tinggal di wilayah pedesaan yaitu sebanyak 279 kabupaten. (4) Menyajikan perbandingan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah dan gap penelitian yang ada, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembangunan desa terhadap tingkat kemiskinan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pembangunan desa yang selama ini dilakukan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin baik melalui peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah data kabupaten. Penelitian ini memilih kabupaten yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Kabupaten yang dipilih adalah kabupaten yang minimal 70 persen penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Jumlah

kabupaten yang menjadi unit observasi sebanyak 279 kabupaten. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode OLS.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Variabel *dependent* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan kabupaten. Variabel *independent* utama yang digunakan adalah variabel pembangunan desa yang didekati dari indikator persentase jumlah desa berkembang dan mandiri setiap kabupaten, indikator tersebut ditentukan berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Studi ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol berdasarkan rujukan *literature review* yang relevan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, antara lain indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (RLS), produk domestik regional bruto kabupaten (PDRB), *Gini Ratio*, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan *dependency ratio* (Ravallion 2001; Adams Jr 2004; Afzal dkk. 2012; Tilak 2002; Pide dan Alyas 2018; Sinnathurai 2013; Murjani 2019).

Mengingat bahwa sifat data variabel pembangunan desa adalah akumulasi dari proses pembangunan dari waktu ke waktu yang diukur dalam satu titik waktu tertentu, maka penggunaan data *cross section* tahun 2018 sudah mampu menjawab tujuan penelitian di atas. Tetapi karena pola pembangunan yang mungkin berbeda terutama sejak disahkannya UU desa yang diaplikasikan mulai tahun 2015, maka penelitian ini juga membentuk model regresi untuk tahun 2014, sehingga penelitian ini membentuk dua model regresi dengan dua titik waktu yang berbeda, yaitu model regresi pada tahun 2014 dan model regresi pada tahun 2018. Penggunaan data

penelitian tahun 2014 dan 2018 ini merujuk pada ketersediaan data IPD yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2014 dan 2018 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan Pendataan Potensi Desa (PODES).

Pembentukan dua model regresi yang berbeda yaitu pada tahun 2014 dan 2018 juga dilakukan untuk memperkaya informasi dari model yang terbentuk, salah satunya dengan membandingkan koefisien *slope* variabel pembangunan desa antara tahun 2014 dan 2018. Semakin tinggi *slope* koefisien variabel pembangunan desa maka diindikasikan semakin efektif arah pembangunan desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi sebaliknya semakin rendah koefisien variabel pembangunan desa maka diindikasikan semakin tidak efektif arah pembangunan desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga selanjutnya dikembangkan untuk melihat perbandingan model antara wilayah Barat Indonesia dan Timur Indonesia.

Berdasarkan teori hubungan antara pembangunan desa dengan tingkat kemiskinan dan dikuatkan oleh berbagai studi literatur, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu pembangunan desa berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk variabel kontrol, hipotesis yang dibangun berdasarkan teori yang ada yaitu IPM, RLS, dan PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan *gini ratio*, TPT, dan *dependency ratio* berpengaruh positif (peningkatan) terhadap tingkat kemiskinan. Adapun model regresi linier berganda yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Poverty}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Village_Dev}_i + \beta_2 \text{IPM}_i + \beta_3 \text{RLS}_i + \beta_4 \text{Ln(GDP_kap)}_i + \beta_5 \text{GR}_i + \beta_6 \text{TPT}_i + \beta_7 \text{D_Ratio}_i \dots \dots \dots (1)$$

dimana :

Poverty = Tingkat kemiskinan kabupaten (%)

Village_Dev = Persentase jumlah desa berkembang dan mandiri

IPM = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

RLS = Rata-rata lama sekolah kabupaten

GDP_kap = PDRB perkapita

GR = *Gini Ratio* kabupaten

TPT = Tingkat pengangguran terbuka kabupaten

D_Ratio = *Dependency Ratio* kabupaten

i = Kabupaten

Persamaan regresi linear yang dibangun dengan metode OLS akan menghasilkan estimator atau koefisien regresi yang bersifat *Best Linear Unbiased Esimator* (BLUE) ketika memenuhi beberapa asumsi klasik. Asumsi-asumsi dasar tersebut diantaranya adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model regresi yang terbentuk baik untuk data tahun 2014 dan 2018 ditunjukkan pada tabel 1. Hasil uji asumsi dari *residual* kedua model regresi menunjukkan terpenuhinya asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan terbebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 1.
Ringkasan Koefisien Regresi Tahun 2014 dan 2018

Variabel	2014		2018	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Desa (Village_Dev)	-0,064	0,004***	-0,110	0,000***
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-0,628	0,001***	-0,617	0,001***
Rata-rata lama sekolah (RLS)	-0,577	0,377	-0,028	0,962
PDRB per kapita (GDP_kap)	-1,883	0,027**	-2,199	0,006***
Gini Ratio (GR)	10,979	0,134	19,733	0,022**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,292	0,037**	0,079	0,756
<i>Dependency Ratio</i> (D_Ratio)	0,063	0,175	0,028	0,533
Constant	73,957	0,000***	78,710	0,000***
Prob Uji F	0,000***		0,000***	

Keterangan : *** signifikansi 1%, ** signifikansi 5%, * signifikansi 10%

Sumber : Hasil olah data, 2021

Berdasarkan model regresi yang terbentuk pada tabel 1, variabel utama pembangunan desa (Village_Dev) memiliki koefisien slope yang negatif, yaitu -0,064 untuk data tahun 2014 dan -0,110 untuk data tahun 2018. Koefisien slope yang negatif ini

menunjukkan bahwa pembangunan desa signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan kabupaten di Indonesia. Artinya, semakin tinggi atau semakin maju pembangunan desa maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Kabupaten-kabupaten dengan pembangunan desa yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan kabupaten-kabupaten dengan pembangunan desa yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tabel 1 menunjukkan pengaruh variabel pembangunan desa terhadap tingkat kemiskinan secara statistik signifikan, ditunjukkan oleh nilai p-value (probabilitas) yang lebih kecil dari alpha 5 persen.

Pengaruh peningkatan pembangunan desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan sesuai temuan pada tabel 1 juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan dari beberapa komponen pembangunan desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Fan, Hazell, dan Thorat 2000; Dercon dkk. 2007; Fan dan Zhang 2008; Khandker, Bakht, dan Koolwal 2009; Khandker dan Koolwal 2010; Mu dan Walle 2011; Uddin, Chowdhury, dan Ahmad 2015; Charlery, Qaim, dan Smith-Hall 2016; Ahmed dan Eklund 2019; Medeiros, Ribeiro, dan Amaral 2021). Meskipun penelitian-penelitian tersebut dilakukan secara parsial, tetapi variabel-variabel yang digunakan sebagian besar adalah komponen pembangunan desa seperti infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, layanan dasar, dan lain-lain.

Hasil di atas juga sejalan dengan beberapa pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembangunan desa yang dilakukan secara massif akan meningkatkan akumulasi modal terutama modal publik ke level yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan output atau produktivitas masyarakat di wilayah

pedesaan. Pembangunan jalan pedesaan misalnya dapat meningkatkan produksi yang lebih besar pada lahan-lahan yang kurang produktif karena akses yang sulit, mengurangi biaya transportasi, menghasilkan aktivitas pasar yang lebih besar, dan mendorong produktivitas dan pendapatan masyarakat desa.

Pembangunan desa seperti pasar desa juga dapat mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan diversifikasi sumber mata pencaharian diluar pertanian, dan mendorong ekonomi lokal terutama bagi masyarakat miskin karena lokasi yang lebih dekat dan ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Pembangunan desa juga mampu meningkatkan investasi ekonomi, mengembangkan usaha-usaha lokal masyarakat setempat seperti kerajinan tangan, industri-industri kecil, perdagangan, penyediaan usaha makan minum, dan berbagai usaha lain karena akses untuk memasarkan menjadi jauh lebih mudah.

Hasil regresi pada tabel 1 menunjukkan koefisien regresi variabel pembangunan desa tahun 2018 lebih besar dari tahun 2014. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa arah pembangunan desa yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 semakin efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di wilayah pedesaan di Indonesia. Besarnya elastisitas penurunan tingkat kemiskinan dari variabel pembangunan desa di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2014 diduga salah satunya sebagai akumulasi terlaksananya amanat Undang-Undang desa, terutama hadirnya dana desa yang dikucurkan setiap tahun langsung ke rekening desa sejak tahun 2015. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan dari dana desa terhadap penurunan tingkat

kemiskinan (Sari dan Abdullah 2017; Arham dan Payu 2019; Daforsa dan Handra 2019; Oktavia 2020).

Dalam kurun waktu tahun 2015-2018, jumlah dana desa yang telah dikucurkan langsung dari pemerintah pusat mencapai 187,65 triliun rupiah. Selama hampir empat tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang besar, infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan. Investasi publik yang dilaksanakan di desa juga akan mendorong secara langsung terbukanya lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat desa yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan regulasi yang ada, dana desa wajib dikelola dengan menggunakan prinsip swakelola, dengan sistem ini kebutuhan tenaga kerja mayoritas

akan dipenuhi dari penduduk desa setempat. Pemerintah desa diwajibkan untuk menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat dengan prioritas masyarakat yang menganggur, miskin, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta keluarga yang menderita kekurangan gizi. Bahan baku yang digunakan juga harus berasal dari desa setempat.

Setelah melihat adanya pengaruh variabel pembangunan desa terhadap penurunan tingkat kemiskinan, hasil dari penelitian ini kemudian dikembangkan untuk melihat seberapa besar angka korelasi dan koefisien variabel atau *slope* dari variabel pembangunan desa untuk wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Untuk memperoleh tujuan tersebut di atas, dibentuk dua model regresi antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Tabel 2.

Ringkasan Koefisien Regresi dan Koefisien Korelasi Variabel Pembangunan Desa antara Wilayah Bagian Barat dan Wilayah Bagian Timur Indonesia Tahun 2014 dan 2018

Rincian	Tahun	Indonesia Bagian Barat		Indonesia Bagian Timur	
		Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koefisien Regresi/ <i>Slope</i>	2018	-0,010	0,646	-0,167	0,000***
	2014	-0,004	0,857	-0,143	0,000***
Koefisien korelasi	2018	-0,1350		-0,7401	
	2014	-0,0308		-0,7343	

Keterangan : *** signifikansi 1%, ** signifikansi 5%, * signifikansi 10%

Sumber: Hasil olah data, 2021

Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembangunan desa terhadap tingkat kemiskinan kabupaten memiliki kekuatan yang berbeda antara wilayah bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian

timur memiliki koefisien regresi atau *slope* variabel pembangunan desa yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat, baik untuk data tahun 2014 maupun data tahun 2018. Hal tersebut juga dikuatkan dari nilai korelasi yang berbeda

antara dua kawasan tersebut. Rendahnya korelasi maupun koefisien regresi di wilayah barat Indonesia diduga karena *marginal effect* dari variabel pembangunan desa yang semakin kecil, sebagaimana diketahui bahwa variabel pembangunan desa adalah akumulasi pembangunan dari waktu ke waktu. Sebagian besar desa di kawasan barat Indonesia terutama Sumatera, Jawa, dan Bali memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang relatif tinggi. Oleh karena itu pembangunan desa berbasis fisik dan pelayanan dasar menjadi kurang relevan lagi dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di wilayah pedesaan, pendekatan yang perlu dilakukan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat karena modal infrastruktur publik relatif sudah terpenuhi.

Kondisi yang berbeda terjadi di wilayah Indonesia Bagian Timur, dengan melihat korelasi yang tinggi antara variabel pembangunan desa dan tingkat kemiskinan kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur, maka pendekatan peningkatan infrastruktur fisik dan pelayanan dasar masih sangat relevan dilakukan di wilayah-wilayah tersebut. Pada umumnya wilayah Indonesia bagian Timur memiliki capaian pembangunan desa yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Beberapa wilayah tersebut antara lain: Sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat; sebagian wilayah Maluku; dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang ada, hanya wilayah Sulawesi yang memiliki capaian pembangunan desa diatas angka nasional.

Meskipun pendekatan infrastruktur fisik dan pelayanan dasar masih sangat relevan diterapkan di wilayah pedesaan Indonesia Bagian Timur, beberapa wilayah juga perlu mempertimbangkan peningkatan pemberdayaan masyarakat, terutama yang memiliki capaian pembangunan desa yang

relatif tinggi tetapi tidak mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Beberapa daerah tersebut antara lain: tersebar di sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Gorontalo.

SIMPULAN

Dengan menggunakan pendekatan analisis inferensia, peneliti menemukan bahwa wilayah yang memiliki IPD di bawah IPD nasional dan tingkat kemiskinan di atas angka nasional paling banyak tersebar di wilayah timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Secara empiris, variabel pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan kabupaten di Indonesia. Koefisien regresi dari variabel pembangunan desa untuk model tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi pada model tahun 2014. Hasil tersebut mengindikasikan efektivitas arah pembangunan desa yang semakin baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Korelasi antara variabel pembangunan desa dan tingkat kemiskinan di wilayah timur lebih besar dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Implikasi Kebijakan

Mengingat bahwa pembangunan desa signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, maka pembangunan di wilayah pedesaan menjadi salah satu langkah yang perlu untuk terus dilakukan, terutama dalam mengurangi jumlah desa tertinggal menuju desa berkembang dan mandiri.

Program dana desa yang telah berlangsung sejak tahun 2015 perlu dipertahankan oleh pemerintah, program tersebut mampu menghasilkan berbagai

bentuk infrastruktur pedesaan dan komponen pembangunan desa lainnya dalam jumlah yang besar.

Perbedaan kekuatan korelasi dari model yang dibangun terutama antara wilayah kawasan barat dan timur Indonesia mengisyaratkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam pembangunan pedesaan saat ini. Wilayah barat perlu mengurangi pendekatan pembangunan fisik dan memperbanyak pendekatan pemberdayaan, sementara wilayah timur khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, NTT masih relevan pada pendekatan fisik dan pelayanan dasar, terutama dari sisi infrastruktur pedesaan, kesehatan, pendidikan, pasar desa, lembaga keuangan, dan berbagai komponen pembangunan desa lainnya.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama penggunaan level penelitian di tingkat kabupaten, bukan di tingkat desa. Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya data tingkat kemiskinan pada tingkat desa saat ini. Untuk penelitian selanjutnya, level penelitian agar dilakukan di tingkat desa dengan mencari *proxy* yang tepat yang dapat mewakili tingkat kemiskinan desa. Penelitian ini juga belum mengontrol bantuan sosial dari pemerintah karena keterbatasan terkait ketersediaan datanya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan efek bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Jr, Richard H. 2004. "Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty." *World Development* 32 (12): 1989–2014. Diakses pada 30 Agustus 2020. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.08.006>.
- Afzal, Muhammad, Muhammad Ehsan Malik, Ishrat Begum, Kafeel Sarwar, dan Hina Fatima. 2012. "Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis." *Journal of Elementary Education* 22 (1): 23–45. Diakses pada 25 Januari 2021. http://pu.edu.pk/images/journal/JEE/PDF-Files/3_Afzal_malik_ishrat%20final_2012JEE_Vol_22_no_1.pdf.
- Ahmed, Saleh, dan Elizabeth Eklund. 2019. "Rural Accessibility, Rural Development, and Natural Disasters in Bangladesh." *Journal of Developing Societies* 35 (3): 391–411. Diakses pada 3 Januari 2021. <https://doi.org/10.1177/0169796X19868318>.
- Akita, Takahiro, dan Rizal Affandi Lukman. 1999. "Spatial Patterns of Expenditure Inequalities in Indonesia: 1987, 1990 and 1993." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 35 (2): 67–90. Diakses pada 27 Agustus 2020. <https://doi.org/10.1080/00074919912331337597>.
- Arham, Muhammad Amir, dan Bobby Rantow Payu. 2019. "Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal* 8 (4): 324–34. Diakses pada 25 Oktober 2020. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.31698>.
- Charlery, Lindy C., Matin Qaim, dan Carsten Smith-Hall. 2016. "Impact of Infrastructure on Rural Household Income and Inequality in Nepal." *Journal of Development Effectiveness* 8 (2): 266–86. Diakses pada 23 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1080/19439342.2015.1079794>.
- Daforsa, Ferta, dan Hefrizal Handra. 2019. "Analysis of Village Fund Management in Poverty Alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra." *Jurnal Perspektif*

- Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6 (6): 717–28. Diakses pada 21 Januari 2021. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6817>.
- Damayanti, Ratna Ayu, dan Syarifuddin Syarifuddin. 2020. “The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia.” *Development in Practice* 30 (5): 624–34. Diakses pada 24 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>.
- Dercon, Stefan, Daniel Gilligan, John Hoddinott, dan Tassew Woldehanna. 2007. “The Impact of Roads and Agricultural Extension on Consumption Growth and Poverty in Fifteen Ethiopian Villages.” *Centre for the Study of African Economies, University of Oxford, CSAE Working Paper Series*.
- Fan, Shenggen, Peter Hazell, dan Sukhadeo Thorat. 2000. “Government Spending, Growth and Poverty in Rural India.” *American Journal of Agricultural Economics* 82 (4): 1038–51. Diakses pada 9 Januari 2021. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101>.
- Fan, Shenggen, dan Xiaobo Zhang. 2008. “Public Expenditure, Growth and Poverty Reduction in Rural Uganda.” *African Development Review* 20 (3): 466–96. Diakses pada 25 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2008.00194.x>.
- Harun, Harun, Peter Graham, Haryono P. Kamase, dan Monir Mir. 2020. “A Critical Analysis of the Impacts of Financial Literacy and NPM on Village Funds Initiative in Indonesia.” *International Journal of Public Administration* 0 (0): 1–10. Diakses pada 28 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>.
- Khandker, Shahidur R., dan Gayatri B. Koolwal. 2010. “How Infrastructure and Financial Institutions Affect Rural Income and Poverty: Evidence from Bangladesh.” *The Journal of Development Studies* 46 (6): 1109–37. Diakses pada 25 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1080/00220380903108330>.
- Khandker, Shahidur R., Zaid Bakht, dan Gayatri B. Koolwal. 2009. “The Poverty Impact of Rural Roads: Evidence from Bangladesh.” *Economic Development and Cultural Change* 57 (4): 685–722. Diakses pada 23 Oktober 2020. <https://doi.org/10.1086/598765>.
- Medeiros, Victor, Rafael Saulo Marques Ribeiro, dan Pedro Vasconcelos Maia do Amaral. 2021. “Infrastructure and Household Poverty in Brazil: A Regional Approach Using Multilevel Models.” *World Development* 137 (January): 105118. Diakses pada 3 Januari 2021. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118>.
- Mu, Ren, dan Dominique van de Walle. 2011. “Rural Roads and Local Market Development in Vietnam.” *The Journal of Development Studies* 47 (5): 709–34. Diakses pada 9 Januari 2021. <https://doi.org/10.1080/00220381003599436>.
- Murjani, Ahmadi. 2019. “Short-Run and Long-Run Impact of Inflation, Unemployment, and Economic Growth Towards Poverty in Indonesia: ARDL Approach.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2 (1): 15. Diakses pada 25 Januari 2021. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.15-29>.
- Oktavia, Rina. 2020. “Village Fund and Its Impact on Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 24 (1): 79–94. Diakses pada 21 Januari 2021. <https://doi.org/10.22146/jkap.43237>.
- Pide, Akhmad dan Alyas. 2018. “The Effect of Economic Growth and Income Inequality on Poverty in Indonesia.” *International Economics and Finance Journal* 9 (August): 20–26. Diakses pada 25 Januari 2021. <https://doi.org/10.9790/5933-0904022026>.

- Ravallion, Martin. 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages." *World Development* 29 (11): 1803–15. Diakses pada 30 Agustus 2020. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9).
- Runsinarith, Phim. 2009. "Infrastructure Development and Poverty Reduction: Evidence from Cambodia's Border Provinces." *Graduate School of International Studies, Nagoya University*. Diakses pada 26 Agustus 2020. https://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/files/2010/06/24_phim-runsinarith.pdf.
- Sari, Intan Mala, dan Muhammad Faisal Abdullah. 2017. "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15 (1): 34. Diakses pada 21 Januari 2021. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4645>.
- Sinnathurai, Vijayakumar. 2013. "An Empirical Study on the Nexus of Poverty, GDP Growth, Dependency Ratio and Employment in Developing Countries." *Journal of Competitiveness* 5 (June): 67–82. Diakses pada 25 Januari 2021. <https://doi.org/10.7441/joc.2013.02.05>.
- Tilak, Jandhyala B. G. 2002. "Education and Poverty." *Journal of Human Development* 3 (2): 191–207. Diakses pada 30 Agustus 2020. <https://doi.org/10.1080/14649880220147301>.
- Uddin, Md Mahi, Mustafa Manir Chowdhury, dan Afzal Ahmad. 2015. "The Impact of Rural Development Program on Poverty Alleviation: A Case of Bangladesh." *Global Journal of Management and Business* 15 (4): 16-24. Diakses pada 28 Agustus 2020. <https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/1618>.
- Yoseph, Yetro M, Mukhtar Sarman, dan Taufik Hidayat. 2019. "Effectiveness of Use of The Budget Fund One Billion IDR for One Village." *European Journal of Social Sciences Studies* 3 (4): 286-298. Diakses pada 26 Agustus 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532791>.